

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada masalah yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, adanya transformasi yang terjadi dalam perkembangan Kota Sawahlunto. Sebuah kota yang awalnya lahir karena adanya deposit batubara yang melimpah, sehingga berkembang menjadi kota tambang batubara, yang di lengkapi dengan sarana prasarana untuk mendukung dalam proses pertambangan seperti pusat pemerintahan, bangunan-bangunan, akses jalur transportasi kereta api, fasilitas penampungan hasil produksi batubara dan Pelabuhan yang menjadi lokasi pengiriman produksi batubara sampai ke Eropa. Kejayaan tambang batubara Sawahlunto tidak dapat dipungkiri lagi, dengan hasil produksi batubara yang berkualitas dan itu berlangsung sampai akhir tahun 1990-an. Pada awal tahun 2000-an, produksi batubara berkurang hal ini disebabkan karena kondisi krisis ekonomi, selain itu juga munculnya banyak tambang rakyat, konflik dalam pertambangan, terhentinya operasional kereta api, dan rusaknya berbagai fasilitas terkait oprasional pertambangan.

Hal ini lah yang menjadi alasan Kota Sawahlunto bertransformasi menjadi Kota Wisata Tambang. Di bawah kepemimpinan Subari Sukardi yang dilanjutkan oleh Amran Nur, Kota Sawahlunto merumuskan visi menjadi Kota Wisata

Tambang. Berbagai upaya dilakukan, dengan memanfaatkan bangunan dan lahan bekas tambang, Pemerintah Kota Sawahlunto menyulapnya menjadi berbagai objek wisata. Munculnya objek wisata sejarah, seperti Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api, Lubang Tambang serta objek wisata rekreasi. Dalam upaya membangun wisata tambang, Kota Sawahlunto di bawah pimpinan Amran Nur juga berupaya menghimpun semua potensi yang dimiliki oleh Sawahlunto melalui berbagai kegiatan penelitian, kerjasama dengan berbagai jaringan. Hal inilah yang awalnya menjadi cikal bakal Sawahlunto menjadi *World Heritage*. Potensi sejarah dan jejak tinggalan pertambangan di Kota Sawahlunto, menjadi nilai yang luar biasa yang dapat diajukan sebagai *World Heritage*.

Kedua, berbekal data dan potensi yang telah dihimpun, proses pengusulan Sawahlunto menjadi *World Heritage* mulai dilakukan pada tahun 2011 melalui berbagai kegiatan seminar, FGD, survei, konsultasi dengan berbagai akademisi, universitas dan tenaga ahli. Pengusulan ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya pada tahun 2015, Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto masih dalam daftar sementara UNESCO. Dalam proses pengusulan ini juga melalui verifikasi yang lama, serta membutuhkan banyak dokumen pendukung. Pemerintah Kota Sawahlunto selalu berupaya memenuhi semua catatan hasil koreksi, demi terwujudnya menjadi *World Heritage*.

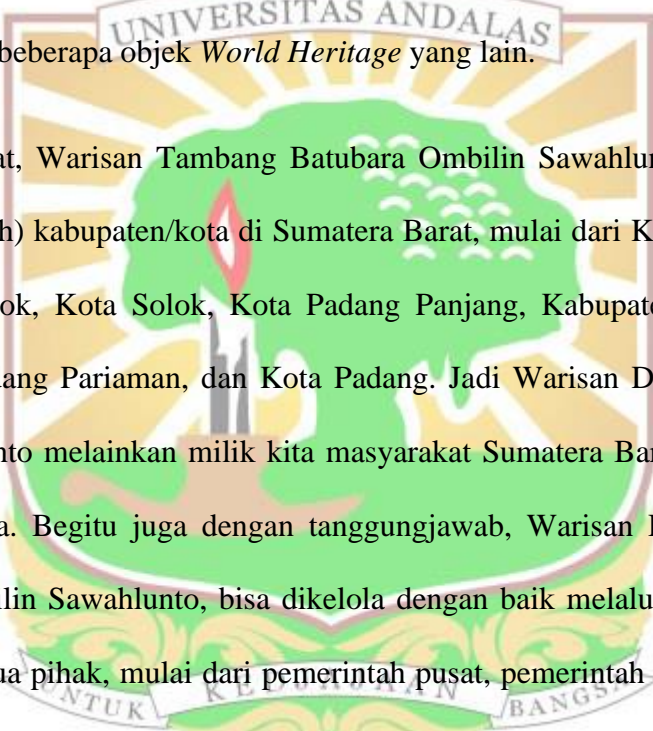
Dalam perkembangan perbaikan dokumen pengusulan, tema yang diajukan akhirnya berubah menjadi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto/

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. Perubahan ini dinilai lebih bisa mengangkat nilai luar biasa dari pengusulan ini. OCMHS dinilai sebagai representasi pertukaran penting teknologi tambang antara Eropa dan koloninya selama paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adanya teknologi yang kompleks ini direncanakan dan dibangun sebagai sebuah sistem yang sepenuhnya terintegrasi dan dirancang untuk memungkinkan penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pengapalan batubara kualitas industri. Hal ini lah menjadi poin penting, keterkaitan antara Kota Sawahlunto sebagai area penghasil batubara, jalur kereta api sebagai sarana transportasi dan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai lokasi penyimpanan dan distribusi batubara ke Eropa. Tiga serangkai ini lah yang menjadi komponen penting sehingga, OCMHS bisa diusulkan menjadi *World Heritage*.

Pembahasan dan penetapan OCMHS sebagai *World Heritage* UNESCO dilaksanakan Sidang komite warisan dunia UNESCO ke43 berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai dengan 10 Juli 2019 di Baku Azerbaijan. OCMHS berhasil ditetapkan menjadi *World Heritage*, pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku Azerbaijan. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai negara pengusul, upaya keras Pemerintah Kota Sawahlunto tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang diinginkan. Penetapan OCMHS juga mempunyai catatan-catatan yang harus dilengkapi, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya.

Ketiga, dalam perjalanan 4 (empat) tahun OCMHS, masih banyak yang harus diupayakan seluruh pihak agar status sebagai *World Heritage* masih menjadi

milik Indonesia. Berbagai permasalahan juga muncul, mulai dengan badan pengelola, pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlindungan terhadap atribut-atribut, pemeliharaan dan lainnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Pengetahuan masyarakat yang minim berdampak pada kondisi beberapa objek yang terbengkalai seperti beberapa stasiun kereta api (stasiun kereta api Muaro Kalaban, stasiun kereta api Solok, dan lainnya), dengan kondisi yang cukup terbengkalai dan belum berfungsi secara maksimal, begitu juga halnya dengan beberapa objek *World Heritage* yang lain.



Keempat, Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto berada pada lintasan 7 (tujuh) kabupaten/kota di Sumatera Barat, mulai dari Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Jadi Warisan Dunia bukan saja milik Sawahlunto melainkan milik kita masyarakat Sumatera Barat, bahkan juga milik Indonesia. Begitu juga dengan tanggungjawab, Warisan Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, bisa dikelola dengan baik melalui kerjasama dan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, pemilik aset, dan tentunya masyarakat. Semua pihak, sudah seharusnya punya rasa memiliki terhadap Warisan Dunia, dan paham akan pentingnya keberadaannya.

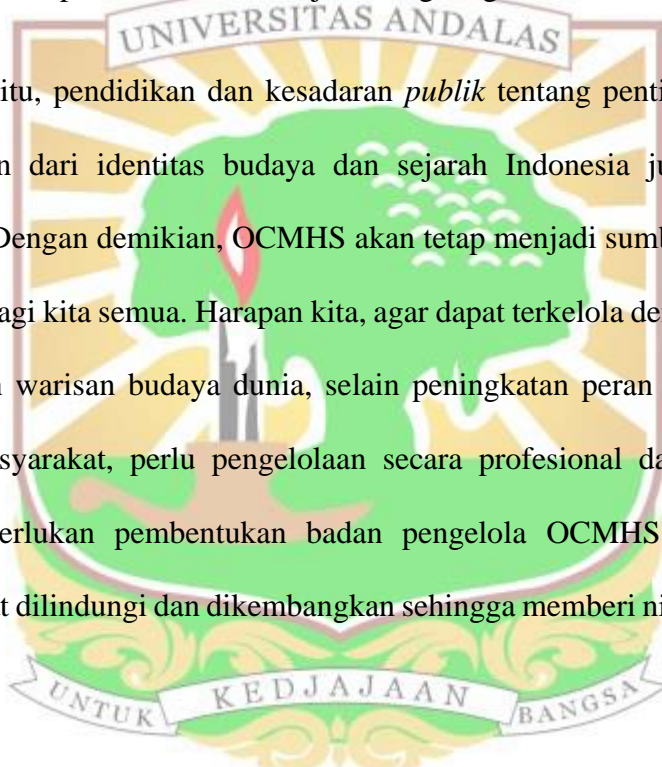
Pengelolaan warisan Dunia bukan hal yang sederhana untuk diselesaikan, butuh komitmen dan visi yang dibangun secara bersama. Saya melihat banyak kajian tentang pemanfaatan objek OCMHS mulai dari aspek pariwisata, kebudayaan, dan nilai-nilai yang belum sejalan dengan pihak terkait sehingga upaya

tersebut tidak maksimal. Butuh tindakan kongkrit dalam pembentukan badan pengelola *World Heritage*, yang bertugas mengelola situs *World Heritage* secara keseluruhan. Keberadaan badan pengelolaan diharapkan dapat bertindak secara teknis dalam administrasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Kemudian juga pentingnya pembagian dan batasan kewenangan masing-masing pihak, sehingga tidak tumpang tindih dan lepas tanggung jawab. Koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak dalam membahas tentang progres yang terjadi, dan permasalahan di lapangan. Impian ini tidak akan berhasil kalau Sawahlunto berjalan sendiri, semua pihak harus ikut serta bahu membahu mendukung keberadaan Warisan Dunia. Hal yang memalukan ketika kita memiliki OCMHS, tapi memberikan kesan buruk Indonesia karena ketidakmampuan dalam mengelola. Siapa yang tak bangga, kota kecil seperti Kota Sawahlunto bisa berjuang penuh menjadi bagian dari *World Heritage* UNESCO.

Kelima, upaya lain dalam pemanfaatan dan pengembangan OCMHS sebagai *World Heritage* melalui reaktivasi ekosistem OCMHS melalui ieven Galanggang Arang Galanggang Arang dilaksana pada tahun 2023 dan 2024 nantinya. Gelanggang Arang adalah kegiatan kolaborasi yang melibatkan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang dilalui jalur OCMHS. Kegiatan Gelanggang Arang bertujuan untuk penguatan ekosistem kebudayaan melalui penggalian nilai dan pengetahuan yang terpendam di sepanjang kawasan OCMHS. OCMHS sebagai *World Heritage* merupakan momen yang sangat bersejarah dan penting. Sejak ditetapkan sebagai *World Heritage* oleh UNESCO pada 6 Juli 2019, OCMHS telah menjadi simbol penting bagi keberagaman budaya dan sejarah Indonesia. Momentum ini sekaligus

dapat memperkuat kesadaran kita akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam OCMHS ini. OCMHS juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab untuk melestarikan dan merawat Warisan Dunia ini agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Harapan OCMHS terus menjadi pusat perhatian dan secara terus menerus melakukan upaya pelestarian. Perlunya memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan OCMHS dilakukan dengan bijaksana, melibatkan masyarakat setempat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran *publik* tentang pentingnya OCMHS sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah Indonesia juga harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, OCMHS akan tetap menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi kita semua. Harapan kita, agar dapat terkelola dengan baik dalam hal pelestarian warisan budaya dunia, selain peningkatan peran Pemerintah dan partisipasi masyarakat, perlu pengelolaan secara profesional dan proporsional, untuk itu diperlukan pembentukan badan pengelola OCMHS. Harapan agar OCMHS dapat dilindungi dan dikembangkan sehingga memberi nilai manfaat bagi masyarakat.

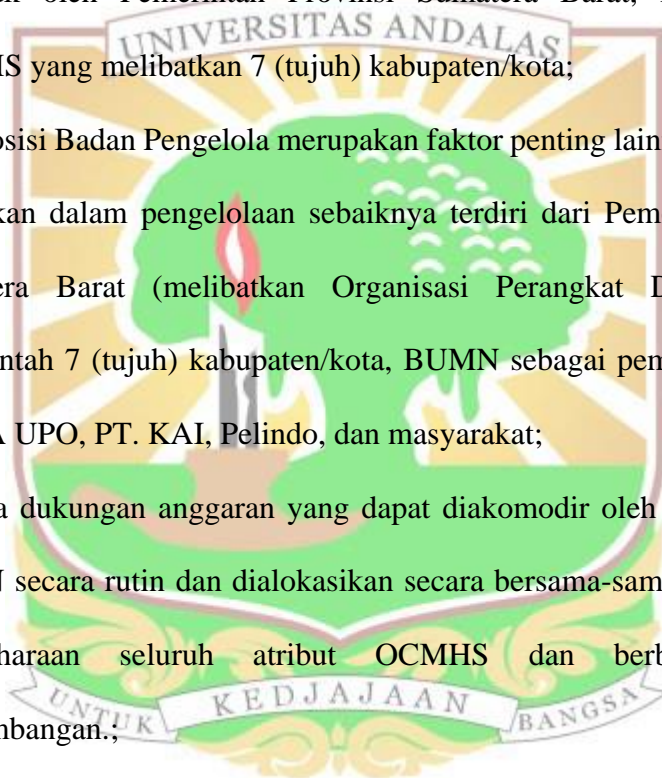


Beberapa rekomendasi terkait keberlanjutan OCMHS sebagai berikut :

1. Pentingnya komitmen pimpinan daerah dengan visi dan tujuan yang sama, baik itu pada level provinsi dan level kabupaten/kota. Selain itu juga kerja sama antara pemerintah dengan BUMN sebagai pemilik aset OCMHS. Hal ini menjadi penting karena nantinya akan berujung pada kebijakan yang

diambil dalam rangka tanggungjawab dalam pengelolaan OCMHS sebagai *World Heritage*;

2. Menyegerakan Pembentukan Badan Pengelola OCMHS, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (pasal 97 ayat 3 dan 4). Badan Pengelola merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan OCMHS. Badan Pengelola ini sebaiknya dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengingat area OCMHS yang melibatkan 7 (tujuh) kabupaten/kota;
3. Komposisi Badan Pengelola merupakan faktor penting lainnya. Unsur yang dilibatkan dalam pengelolaan sebaiknya terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait), Pemerintah 7 (tujuh) kabupaten/kota, BUMN sebagai pemilik aset seperti PT. BA UPO, PT. KAI, Pelindo, dan masyarakat;
4. Adanya dukungan anggaran yang dapat diakomodir oleh pemerintah dan BUMN secara rutin dan dialokasikan secara bersama-sama, dalam rangka pemeliharaan seluruh atribut OCMHS dan berbagai kegiatan pengembangan,;
5. Perlunya rapat koordinasi secara rutin yang melibatkan semua pihak terkait, dalam rangka membahas perkembangan seluruh atribut OCMHS mulai dengan pengelolaan secara umum sampai kepada teknis pemeliharaan, pengembangan serta pemanfaatan;



6. Menyusun laporan perkembangan OCMHS melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk kebutuhan laporan kepada UNESCO. Mulai progres catatan dari ICOMOS dan UNESCO maupun laporan keterawatan dan pemeliharaan atribut OCMHS.

